

Pengawas Ad Hoc Diaktifkan Lagi

PURWOREJO (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo kembali mengaktifkan pengawas ad hoc ditingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Menyusul diaktifkan kembali lembaga ini untuk melakukan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup), yang tahapannya kembali dilanjutkan mulai Senin (15/6). "Jajaran pengawas mulai aktif kembali untuk mengawasi kegiatan tahapan Pilbup," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq SH STHl MKn. Mengawali kegiatan ini Bawaslu menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) yang dilaksanakan secara daring, guna mengkoordinasikan persiapan pengaktifan kembali jajaran pengawas agar dapat melakukan pengawasan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dikatakan pula, dalam waktu dekat jajarannya akan melakukan pengawasan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Purworejo. "Pengawasan tersebut tentu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar Covid-19 lagi," tambahnya. Lebih lanjut Nur Kholiq mengatakan secara khusus Kabupaten Purworejo memiliki bakal pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati yang maju lewat jalur perseorangan. Secara khusus dalam waktu dekat mempersiapkan pengawasan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan. Sementara itu Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Abdul Azis SPd mengatakan, pengawasan Pilkada di masa pandemi memiliki tantangan tersendiri. "Bukan sekadar menjaga marwah demokrasi, tetapi menjaga protokol kesehatan lebih utama," kata Abdul Aziz. **(Nar)-o**

Salatiga Bangun Kawasan Kuliner

SALATIGA (KR) - Dinas Perdagangan Salatiga merealisasikan bangunan dan penempatan pedagang kaki lima (PKL) untuk kawasan kuliner baru di titik strategis kawasan Kridanggo Salatiga. Kepala Dinas Perdagangan Salatiga, Kusumo Aji mengatakan kawasan Kridanggo yang ditata oleh pemerintah kota bisa dijadikan kawasan baru tempat nongkrong dan kuliner dengan suasana yang baru pula. Lapak pedagang menjadi bersih dan dibersihkan tempat berjualan dua lantai yang menelan anggaran Rp 1 miliar lebih di tahun 2019 lalu. "Kami berharap kawasan ini menjadi salah satu pilihan warga. Penataan dilakukan agar kawasan PKL Kridanggo menjadi indah dan nyaman untuk nongkrong dan makan. Bangunan dua lantai sudah terwujud dan mulai ditempati. Para PKL saat pembangunan lalu sempat dipindahkan ke daerah dekat stadion," jelas Kusumo Aji, Senin (15/6).

Dari data di Dinas Perdagangan Salatiga, jumlah PKL yang berhak menempati tempat ini 36 orang dengan rincian yang berjualan di lantai 1, 20 pedagang sedangkan lantai 2 nantinya 16 pedagang. "Dari pantauan kami belum semuanya membuka lapak dagangan karena kemungkinan masih terdampak wabah virus korona," ujar Kusumo Aji. Dari pantauan KR, tempat PKL Kridanggo menjadi tempat nongkrong baru di Salatiga khususnya pada siang hari. Sebab di kawasan ini disuguhkan makanan dan aneka minuman. **(Sus)-o**

Abaikan Protokol Kesehatan Ditutup

KLATEN (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengancam akan menutup tempat usaha seperti toko, warung makan dan sebagainya yang mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini sebagai upaya melindungi masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19. "Kita cek perdagangan apakah sudah menerapkan protokol kesehatan. Mayoritas telah melaksanakan. Namun kita terus mengimbau," ujar Sekda Klaten, Jaka Sawaldi saat ditemui KR disela pengecekan dan sosialisasi protokol kesehatan di pusat perdagangan di Jalan Pemuda Klaten, Sabtu (13/6). Dijelaskan, kegiatan pengecekan dan sosialisasi protokol kesehatan akan gencar dilakukan dalam rangka menyongsong kenormalan baru (New Normal). Pusat perdagangan diminta mendukung dan menaati imbauan dari pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Jika nanti didapat masih ada (tempat usaha) yang tak menaati protokol kesehatan maka akan ada sanksi, seperti ditutup dan tidak boleh beroperasi," tandas Jaka Sawaldi. Selain gencar melakukan pengecekan dan sosialisasi protokol kesehatan, Pemkab Klaten juga menggiatkan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum antara lain alun-alun, Masjid Agung Al Aqsha, Masjid Raya, dan sekolah-sekolah. Pihaknya juga membentuk satgas sekolah, karena bagaimanapun anak-anak ini nanti kalau sudah masuk menyongsong new normal ada bahayanya yang mungkin harus diketahui. Agar jangan sampai terpapar maka kita harus terlebih dahulu memberikan sosialisasi untuk antisipasinya. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Klaten, Rabiman, menambahkan, kegiatan pengecekan dan sosialisasi protokol kesehatan ini dalam rangka persiapan menuju New Normal. Sasarannya tempat usaha sepanjang Jalan Pemuda Klaten. **(Lia)-o**

Umumkan Kelulusan Kenakan Pakaian Adat

PURWOREJO (KR) - SD Mutiara Ibu Purworejo melakukan cara yang unik dalam mengumumkan kelulusan siswa kelas VI. Sejumlah guru dengan berpakaian adat, mengunjungi setiap rumah siswa yang lulus. Mereka mengalungkan medali, memberi hadiah, menyerahkan ijazah, rapor, dan piagam kepada anak didik. Guru Kelas VI SD Mutiara Ibu Vicentia Rosana mengatakan, cara itu ditempuh demi mematuhi protokol pencegahan Covid-19. "Sabtu kemarin kami laksanakan pelepasan secara daring, kemudian hari ini dibuat tim guru, mereka mengunjungi 20 anak kami yang lulus tahun ini," ungkapnya, Senin (15/6). Mereka menggunakan pakaian adat Papua, Jawa, dan Dayak, lengkap dengan alat musik perkusi, berangkat membagikan ijazah. Para guru menyanyikan lagu populer dan membuat siswa serta orang tua terkejut. **(Jas)-o**



KR-Jarot Sarwosambodo

Guru berpakaian adat menyerahkan berkas kelulusan.



KR-Chandra AN

SEORANG petugas Dinas Pertamanan dan Penerangan Kota Semarang, Senin (15/6) sibuk memperbaiki lampu-lampu antik yang rusak di kawasan Kota Lama Semarang. Pemerintah Kota Semarang serius menggarap Kota Semarang menjadi salah satu tujuan wisata heritage yang sering disebut sebagai Little Holland atau Negeri Belanda Kecil. Karenanya sekarang banyak bangunan kuno berarsitek Belanda diperbaiki dan direkonstruksi untuk mengembalikannya pada nuansa tempo dulu.

Belum Terlihat, Kontribusi BUMD dalam PAD

SEMARANG (KR) - FPKB DPRD Jateng minta kepada Pemprov Jateng memberikan penjelasan rinci terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Dengan cara tersebut kinerja BUMD bisa dipantau maksimal. Demikian diungkapkan anggota FPKB DPRD Jateng Muhammad Zen Adv, Senin (15/6).

Menurut Zen, BUMD harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan PAD. BUMD memiliki jangkauan perluasan pasar yang tak terbatas, dengan demikian juga memiliki potensi keuntungan tak terbatas pula. Keuntungan inilah nantinya masuk dalam komponen PAD yang mestinya melampaui jumlah pendapat-

an pajak daerah.

Sayangnya, peran BUMD tak terlihat dalam PAD 2019 tersebut. Zen yang juga selaku anggota Komisi E mengatakan, PAD Provinsi Jateng pada 2019 sebesar Rp 14,4 triliun. Dari jumlah itu, komponen penyumbang PAD terbesar adalah pajak daerah Rp 11,9 triliun (82,78%). Dari retribusi daerah

Rp 114 miliar (0,80%), dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 512 miliar atau 3,55%, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 1,8 triliun atau 12,8%. "Fokus peningkatan PAD dengan optimalisasi BUMD, dampaknya tidak akan terlalu banyak dikeluhkan oleh masyarakat. "Bandingkan dengan semisal menaikkan pajak bumi

bangunan (PBB) atau pajak kendaraan bermotor. Karena ini akan terasa langsung oleh rakyat," tegas Zen.

FPKB juga mengkritik pendapatan keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp 26,3 triliun, yang diperoleh dari PAD hanya Rp 14,4 triliun (55%). Sementara uang lain berupa pendapatan transfer sebesar Rp 11,3 triliun (44%), dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp 23,1 miliar atau 0,09%.

Terlihat dalam angka tersebut, nilai transfer sebagai komponen fiskal masih cukup besar.

iBukan berarti harus dikalikan dengan mengurangi akses anggaran ke pusat, namun menjadi acuan agar proporsi PAD harus ditingkatkan jumlahnya sampai minimal 70% dari total pendapatan daerah dengan tata cara yang tidak memberatkan masyarakat," ujar Zen.

Harapannya, dengan proporsi PAD yang besar, Pemprov Jawa Tengah akan memiliki kewenangan lebih luas yang menyangkut kebijakan khusus daerah utamanya kebijakan yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. **(Bdi)-o**

FMIPA Unimus-HEPI UKD Jateng Gelar Webinar

SEMARANG (KR) - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) bekerja sama dengan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia Unit Kerja Daerah Jateng (HEPI UKD Jateng) menggelar seminar online (webinar) di Gedung Pertemuan Fakultas Kedokteran Lantai 7 Unimus, Sabtu (13/6).

Webinar nasional dengan moderator Dekan FMIPA Unimus Dr Eny Winaryati MPd ini dihadiri Kepala HEPI UKD Jateng Prof Dr Kartono MSi dan dibuka Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd dengan keynote speaker Prof Kumaidi PhD (Guru Besar Bidang Psikometrika Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Webinar menghadirkan narasumber pakar, Prof Dr Fakhruddin MPd (Rektor Universitas Panca Sakti Tegal), Prof Dr Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni MA (Guru Besar Bidang Asesmen Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Bali)



KR-Sugeng Irianto

Dekan FMIPA (kanan) dan Ketua HEPI UKD Jateng saat webinar.

mengusung tema 'Asesmen Pembelajaran di Era New Normal'.

Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd menyampaikan asesmen pembelajaran di era New Normal ini merupakan hal sangat penting karena pembelajaran di New Normal bisa disamakan dengan pembelajaran sistem daring (dalam Jaringan) atau Learning From Home. Namun kasus yang sering dijumpai pada sistem pembelajaran online adalah banyaknya tenaga pendidik yang salah mempersepsikan arti pembelajaran di rumah atau daring dengan hanya membe-

rikan tugas-tugas. Ini memicu tingkat stres tinggi pada siswa maupun mahasiswa.

Rektor meminta yang seharusnya dilakukan ialah menyamaratakan proporsi belajar yang selama ini diberlakukan di dalam kelas. Rektor Unimus yang juga Wakil Dewan Pendidikan Jateng mengimbau kepada semua pihak khususnya guru, dan dosen untuk mendukung sistem pembelajaran dari rumah dengan bijak, yang artinya guru atau dosen memberikan proporsional tugas 80% menjelaskan materi belajar secara daring, dan 20% pemberian tugas. **(Sgi)-o**

Disabilitas Belum Terima Bantuan

PURWOREJO (KR) - Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, mengakui, jika sampai saat ini masih ada warga yang terdampak Covid-19 namun belum mendapatkan bantuan. Termasuk kaum disabilitas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo membuka akses seluas-luasnya bagi warga yang berhak namun belum mendapat bantuan.

"Kita akui yang belum mendapatkan bantuan itu masih ada. Makanya kami terus membuka diri, jika ada warga yang benar-benar membutuhkan tapi belum mendapat bantuan," kata Yuli Hastuti, Senin (15/6). Di sela-sela memberikan bantuan logistik kepada warga berkebutuhan khusus di Gedung PKK Purworejo, Hj Yuli Hastuti menandakan, bahwa para penerima bantuan ini, sebelumnya memang belum mendapatkan bantuan resmi dari pemerintah.

"Bantuan ini berasal dari Gugus Tugas Nasional (Percepatan Penanganan Covid-19), mereka berasal dari penceramatan yang dilakukan Dinas Sosial," jelasnya didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda Purworejo Rita Purnama SSTP MM. Dikatakan, pihaknya tidak ingin ada warga yang tercecer dari bantuan. Warga yang tidak mendapatkan, padahal berhak, maka bisa mengusulkan ke pemerintah desa. Dari desa ditindaklanjuti dengan melaporkan ke kabupaten sepengetahuan camat.

"Kemana saja bisa, ke BPBD atau ke Dinas Sosial. Atau kalau kebetulan ketemu saya langsung, laporkan saja tidak apa-apa," tegasnya. Bantuan diberikan berupa beras, minyak, gula, teh, kopi, ikan kaleng, serta mi instan. **(Nar)-o**

Dipersiapkan, Gedong Songo Dibuka Kembali

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sedang menyiapkan objek wisata (Obwis) Gedong Songo untuk dibuka kembali, setelah ditutup sejak Maret lalu. Untuk itu Ganjar Pranowo minta kepada para pedagang bersabar sambil menunggu simulasi yang akan segera dilakukan.

Ganjar Pranowo mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Senin (15/6). Dikatakan, sudah melihat kondisi Obwis Gedong Songo pada Sabtu (13/6), dan melakukan dialog dengan para pedagang yang sudah tidak sabar menanti agar Gedong Songo kembali dibuka untuk objek wisata. Para pedagang diminta tetap sabar, karena saat ini pemerintah sedang gencar melakukan persiapan untuk kembali membuka fasilitas-fasilitas publik termasuk pariwisata.

ta, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk itu, sebelum objek wisata dibuka, terlebih dulu akan dilakukan simulasi. "Kita mesti latihan dulu ya, disiapkan nanti kira-kira seperti apa. Kemarin saya sudah ke Borobudur juga sama, sedang menyiapkan. Nanti pedagang diajak simulasi, cara jual belinya gimana, pengaturan jaraknya gimana, pembayarannya langsung dipegang atau disiapkan tempat khusus. Ini kan perlu latihan, tidak bisa cepat-cepat," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo melakukan pengecekan di Gedong Songo sambil gowes dari kediamannya di Semarang ke Candi Gedong Songo, untuk mengetahui persiapan Gedong Songo apabila nantinya akan dibuka kembali untuk pariwisata di Kabupaten Semarang. Ganjar Pranowo minta

pengelola Gedong Songo menyiapkan polisi wisata, yang nantinya akan bertugas untuk mengawasi pengunjung, menegur mereka yang tidak taat aturan serta membatasi agar tidak ada kerumunan.

"Saya minta segera dilakukan simulasi. Diujicoba dulu dengan sedikit pengun-

jung, mengajak wartawan dan pegiat pariwisata sehingga bisa diketahui bagaimana pengelolaannya. Polisi wisata juga harus dioptimalkan untuk mengatur, agar semua yang ada di sini nantinya bisa aman dan nyaman," tegasnya.

Pengelola objek wisata Candi Gedong Songo,



KR-Budiono

Ganjar Pranowo saat melakukan pengecekan di Obwis Gedong Songo, untuk persiapan simulasi.

Siswanto mengatakan, objek wisata yang dikelolanya sudah ditutup sejak Maret lalu. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan sarana prasarana apabila nanti kembali dibuka. "Sedang disiapkan semuanya, seperti tempat cuci tangan, poster imbauan, garis-garis untuk jaga jarak dan sebagainya. Minggu depan kemungkinan kami akan melakukan simulasi," ujar Siswanto.

Siswanto mengatakan, setiap hari tak kurang dari 500 wisatawan masuk ke tempat wisata Gedong Songo. Bahkan pada akhir pekan atau hari libur nasional, jumlah pengunjung Gedong Songo bisa mencapai 5.000 orang. Untuk itu, agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, pengelola tetap akan memberlakukan pembatasan pengunjung hingga 50 persen. **(Bdi)-o**